



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **LANTIP DIAT PRASOJO**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG KEUANGAN**
3. NHK : **723992**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 6.528.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 310 m2/250 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.160.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 478 m2/50 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI , Rp. 478.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/168 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI , Rp. 650.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/172 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI , Rp. 700.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 183 m2/183 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 294 m2/75 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/158 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI , Rp. 740.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 15.000.000**

1. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 62.700.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	495.108.075
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.100.808.075
III. HUTANG	Rp.	2.780.639.410
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.320.168.665

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.